

## PRINSIP BEBAS-AKTIF INDONESIA PADA PRESIDENSI G20 TAHUN 2022

Agus Nilmada Azmi<sup>1</sup>, Raisya Bintang<sup>2</sup>

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>1,2</sup>

### Abstract

*The Indonesian Ministry of Foreign Affairs revealed that the polarization of the international structure and the conflict between Russia and Ukraine in January 2022 have become challenges in gaining consensus on various commitments for Indonesia's G20 presidency in 2022. The conflict also has the potential to reduce soft power in an attempt to build branding to achieve national interests. This research uses a literature study method through the analysis of foreign policy documents, official speeches, and various supporting documents that explain the steps implemented by the Indonesian government in the G20 Presidency. In the G20 Presidency, Indonesia applied the principle of free and active (Bebas- Aktif) in embracing every group, handling the Russian-Ukrainian conflict, and achieving various national interests. During the G20 Presidency, Indonesia also implemented a multilateral approach in order to promote regional stability by paying attention to cross-security issues and peace efforts. The implementation of the free-active principle in the G20 Presidency aims to fulfill Indonesia's national interest in the welfare of society.*

**Keyword:** Bebas-aktif; national interest.; Rusia-Ukraina

### Abstrak

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa polarisasi yang terjadi pada struktur internasional dan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada Januari 2022 telah menjadi salah satu tantangan dalam mendapatkan konsensus dari berbagai komitmen pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Konflik yang terjadi juga berpotensi mengurangi *soft power* dalam upaya membangun *branding* untuk mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur melalui analisis dokumen kebijakan luar negeri, pidato resmi, dan berbagai dokumen pendukung yang menjelaskan langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada Presidensi G20. Dalam Presidensi G20, Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif dalam merangkul setiap kelompok dan menangani konflik Rusia Ukraina dan mencapai berbagai kepentingan nasional. Selama Presidensi G20, Indonesia juga menerapkan suatu pendekatan multilateral agar dapat mempromosikan stabilitas kawasan regional dengan memperhatikan pada isu-isu keamanan lintas dan upaya perdamaian. Pengimplementasian prinsip bebas-aktif pada Presidensi G20 bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat.

**Kata Kunci:** Bebas-Aktif; Kepentingan nasional; Rusia-Ukraina

Copyright (c) 2024 Agus Nilmada Azmi<sup>1</sup>, Raisya Bintang<sup>2</sup>.

✉ Corresponding author : Agus Nilmada Azmi

Email Address : agus.nilmada.azmi@uinjkt.ac.id

## PENDAHULUAN

Prinsip dasar dari kebijakan luar negeri Indonesia dilandaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama yang berbunyi “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan*” dan alinea keempat “*Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia kemudian mencetuskan prinsip bebas-aktif sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya (Sabir, 2022).

Adapun makna dari prinsip bebas-aktif yaitu, bebas berarti bangsa Indonesia berhak menentukan sikap dalam menghadapi masalah tanpa berpihak pada blok-blok kekuatan atau persekutuan militer yang ada di dunia. Aktif bahwa Indonesia selalu memperjuangkan “*Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*” di dunia. Prinsip bebas-aktif telah diimplementasikan oleh para pemimpin Indonesia pemimpin Indonesia dalam praktik hubungan luar negerinya (Haryanto et al., 2014).

Pada masa Presiden Ir. Soekarno, implementasi prinsip bebas aktif dapat dilihat pada momentum ketika Indonesia negara inisiator Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok (GNB). Hal tersebut juga terlihat dalam isi dari pidato Presiden Ir. Soekarno dalam pertemuan bersama Presiden Kennedy tanggal 24 April 1961 di Washington yang berbunyi “*Tidak netral, kita tidak penonton langsung daripada kejadian-kejadian di dunia ini, kita tidak tanpa prinsip, kita tidak tanpa pendirian. Kita menjalan politik bebas aktif itu tidak sekedar secara ‘cuci tangan’ tidak sekedar secara defensif, tidak sekedar secara apologetis*” (Deplu, 1996: 460) (Bayu Galih, 2019).

Pada masa Presiden Soeharto, prinsip bebas-aktif diimplementasikan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional melalui keterlibatan Indonesia dalam menjalin kembali hubungan dengan negara-negara Barat dan membangun peran di Asia Tenggara dengan pembentukan ASEAN pada tahun 1967 (Serafica Gischa, 2020). Kemudian pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, realisasi prinsip bebas-aktif dalam praktik hubungan luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui peningkatan keterlibatan peran Indonesia dalam dunia internasional. Hal tersebut dibuktikan munculnya beberapa doktrin-doktrin baru seperti “*sailing in the turbulent ocean*” dan “*zero enemy and thousand friends*” (Haryanto and Pasha, 2016).

Meskipun memiliki arah kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono. Namun, prinsip bebas-aktif tetap diimplementasikan pada pemerintahan Joko Widodo. Realisasi tersebut dapat dilihat pada beberapa kesempatan seperti, peran aktif Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik Rohingnya dan memperluas kawasan keterlibatan regional di Indonesia Pasifik (Jelita, 2022).

Prinsip bebas-aktif merupakan salah satu alat diplomasi Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional, namun tetap berlandaskan identitas negara Indonesia yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. Manifestasi prinsip bebas-aktif dapat dirasakan secara jelas dalam praktik hubungan luar negeri Indonesia terutama pada inisiasi-inisiasi yang dilakukan Indonesia dalam mengambil peran sebagai mediator pada konflik-konflik

internasional. Selain itu realisasi prinsip bebas-aktif juga dapat dilihat dari sikap Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama antar negara maupun peran yang diambil dalam organisasi atau forum internasional (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).

Pada tahun 2022 Indonesia mendapat kesempatan sebagai pemimpin dari forum G20. G20 merupakan forum formal internasional yang tidak memiliki sekretariat permanen, namun telah memainkan berbagai peranan penting dalam perekonomian dan keuangan global. (Cooper and Thakur, 2013). Forum G20 mewakili 80% PDB global, 75% perdagangan global, dan 60% atau sekitar 2/3 populasi dunia. Sehingga dapat dikatakan bahwa forum ini merupakan kelompok ekonomi utama dunia yang memiliki kekuatan politik serta memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan (Albrecht *et al.*, 2014; Ariana, 2016; Jorgenson and Vu, 2021; Parlar Dal, 2022; Yosefi, 2023). Dengan demikian jabatan presidensi G20 memberikan banyak dampak positif serta peluang keuntungan bagi tuan rumah karena pemimpin dari setiap tahun akan bertanggung jawab dalam menentukan arah agenda KTT G20 selama satu tahun ke depan (Astuti, 2020). Pusat studi G20 menyebutkan bahwa G20 merupakan forum ekonomi internasional yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya (Guebert, Tanna and Clement, 2010). Manfaat ini kemudian menyebabkan banyak negara anggota maupun tuan rumah yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing negara melalui forum G20.

Indonesia mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah dari G20 dengan mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*". Alasan diusungnya tema ini adalah untuk mendorong harapan dan semangat pulih bersama antar negara. Selain itu, tema ini juga mengangkat urgensi bahwa diperlukan suatu upaya bersama dan inklusif dalam mencari jalan keluar bersama untuk melakukan pemulihan pada negara-negara yang masih merasakan dampak negatif dari COVID-19. Pada Presidensi G20 tahun 2022 ini, Indonesia mengangkat tiga isu prioritas di antaranya penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, transisi energi berkelanjutan (Kemlu, 2022). Indonesia sebagai pemimpin berarti memiliki kewenangan untuk menentukan agenda dan prioritas G20 selama tahun 2022, sehingga dapat mengarahkan forum untuk mendukung kepentingan nasional.

Namun, dalam hasil wawancara bersama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa polarisasi yang terjadi pada struktur internasional dan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada Januari 2022 telah menjadi salah satu tantangan dalam mendapatkan konsensus dari berbagai komitmen pada sejumlah isu forum G20. Sebagai negara yang menganut prinsip bebas-aktif sebagai landasan utama kebijakan luar negerinya, Indonesia telah mengambil beberapa langkah dalam menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina, salah satunya dengan mediator dan menjalin dialog dengan presiden Rusia dan Ukraina (PPID Kementrian Luar Negeri RI, 2020).

Sebagai tuan rumah G20 tahun 2022, peran Indonesia sebagai pemimpin menjadi krusial. Karena konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berpotensi mengancam kesuksesan dan upaya Indonesia dalam menghasilkan konsensus pada presidensi G20 tahun 2022. Ini merupakan hal yang

mengkhawatirkan karena konflik ini juga akan berpotensi mengancam kepentingan nasional Indonesia. Karena kegagalan dalam menghasilkan konsensus dianggap akan mengurangi citra positif Indonesia yang dikenal sebagai *peace builder* yang merupakan salah satu *soft power* (Kemlu, 2022), sehingga hal ini berpotensi melahirkan tantangan bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, fokus dari penelitian ini adalah untuk *menganalisa implementasi prinsip bebas-aktif pada Presidensi G20 tahun 2022*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan metode pengumpulan data sekunder yang berasal dari dokumen kebijakan luar negeri, pidato resmi, dan berbagai dokumen pendukung yang menjelaskan langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada konteks G20 (Sugiono, 2018). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Dengan mengedepankan prinsip bebas-aktif, selanjutnya studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu, artikel dan jurnal lainnya yang merupakan sumber terpercaya dan akurat mengenai pembahasan prinsip bebas-aktif, konsep kepentingan nasional Indonesia dan kebijakan luar negerinya untuk diimplementasikan pada agenda Presidensi G20.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Presidensi G20 tahun 2022 yang dipegang oleh Indonesia dapat dikatakan tidak mudah mengingat polarisasi struktur internasional yang cukup kompleks akibat dari kompetisi Cina-Amerika serta konflik Rusia-Ukraina yang kembali memanas pada tahun 2022. Dalam menghadapi berbagai polarisasi yang muncul di antara negara-negara anggota G20, Indonesia mempraktikkan prinsip bebas aktif sebagai pendekatan untuk menjaga keseimbangan dan membangun kerjasama yang harmonis antara negara-negara dengan kepentingan yang berbeda. Prinsip bebas aktif ini menekankan pentingnya kemandirian, kebebasan, dan peran aktif Indonesia dalam melaksanakan diplomasi (LUKI AULIA, 2023).

K.J Holsti mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai instrumen politik yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam tatanan dunia internasional demi mencapai kepentingan nasionalnya. Konsep kebijakan luar negeri ini berperan sebagai dasar dan panduan dalam mengambil keputusan serta menghadapi perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional (*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy on JSTOR*, 2023).

Kepentingan nasional dapat menggambarkan aspirasi negara dan dapat diaplikasikan secara operasional pada kebijakan-kebijakan serta rencana yang akan dituju. Beliau juga menyatakan bahwa kepentingan nasional dipakai sebagai alat analisa untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri suatu negara (Thompson, 1971). Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep utama dalam konteks kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional mengacu pada rangkaian tujuan dan nilai-nilai yang dianggap krusial dan fundamental untuk keberlanjutan dan kemajuan negara tersebut.

Prinsip bebas-aktif merupakan salah satu konsep utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya bertujuan untuk memenehui kepentingan nasional negara tersebut. Diimplementasikannya prinsip bebas-aktif selama Presidensi G20 tahun 2022 memperlihatkan upaya Indonesia dalam memanfaatkan peluang keuntungan untuk memenuhi berbagai kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri.

Dalam mengimplementasikan prinsip bebas-aktif pada presidensi G20 tahun 2022 Indonesia berfokus pada penguatan sistem multilateralisme dan kemitraan global yang efektif, untuk memastikan ekonomi dunia tetap terbuka, adil, saling menguntungkan, dan memastikan tidak ada yang tertinggal, terutama kelompok miskin dan rentan. Indonesia juga berupaya untuk melakukan pendekatan inklusif dalam dunia internasional. Di mana Indonesia telah mendorong dialog dan kerja sama di antara anggota G20 dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk negara non-G20, organisasi internasional, dan masyarakat sipil (Indonesia, 2022).

Penerapan prinsip bebas aktif Indonesia pada Presidensi G20 tahun 2022 merupakan upaya strategis dalam mencapai kepentingan nasional dan menerapkan kebijakan luar negeri yang efektif. Prinsip bebas aktif ini memainkan peran penting dalam menjaga kemandirian, kebebasan, dan peran aktif Indonesia dalam hubungan internasional. Melalui penerapan prinsip bebas aktif, Indonesia berusaha untuk mencapai beberapa tujuan dan kepentingan nasional, dengan mengedepankan beberapa aspek seperti ekonomi, lingkungan dan kesehatan.

Peningkatan aksebilitas pasar dan promosi investasi menjadi agenda penting bagi Indonesia dalam menerapkan fokus utama pada kebijakan luar negeri Indonesia dengan mengadopsi pendekatan yang sifatnya proaktif terhadap aksebilitas pada pasar serta menyediakan layanan pada masyarakat Indonesia dan menjadi ajang dalam promosi investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kepentingan nasionalnya (Pdsi Kominfo, 2023).

Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam konteks Presidensi G20 tahun 2022 agar dapat meluaskan akses pasar terhadap berbagai produk Indonesia. Pelaksanaan demikian dicapai melalui perundingan bilateral dan multilateral serta kerjasama ekonomi bagi negara-negara anggota G20 sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam sektor perdagangan bagi Indonesia mencakup kuota, tarif, dan regulasi dalam akses pasar produk Indonesia (Pdsi Kominfo, 2023).

Selama Presidensi G20, Indonesia juga menerapkan suatu pendekatan multilateral agar dapat mempromosikan stabilitas kawasan regional dengan memperhatikan pada isu-isu keamanan lintas, dan upaya perdamaian. Upaya tersebut juga dilakukan Indonesia atas partisipasi aktifnya pada ASEAN dimana Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN yang berkomitmen besar untuk senantiasa mempromosikan berbagai prinsip ASEAN mencakup diplomasi, mendukung perdamaian melalui penyelesaian konflik, melakukan dialog dan lain-lainnya. Indonesia turut membangun dialog yang konstruktif antara negara-negara anggota G20 dan pihak-pihak terkait (*Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2022).

Pada agenda presiden G20 Indonesia juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga dijadikan isu krusial untuk dibahas sebab menjadi salah satu isu utama yang difokuskan pada kebijakan luar negeri Indonesia agar dapat mengelola SDA secara berkesinambungan dan upaya mitigasi atas perubahan iklim. Kerjasama yang digalang Indonesia dengan negara-negara anggota G20 berusaha menangani permasalahan lingkungan global dengan kesepatan mengurangi penggunaan emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, dan mengedepankan penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif energi. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati Indonesia turut mengadvokasi perlindungan lingkungan alam dalam G20. Indonesi mendorong terciptanya kerjasama regional dan internasional agar dapat meminimalisir dampak negatif atas perubahan iklim (Kementerian Sekretariat Negara, 2023).

Implementasi prinsip-bebas aktif Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional juga terlihat dalam sikap Indonesia dalam menggunakan pendekatan multilateral dalam berbagai rangkaian agenda Presidensi G20 tahun 2022. Indonesia menggunakan pendekatan multilateral dalam mengusung *concrete deliverables* (antaranews, 2022) yang merupakan sebuah hasil nyata Presidensi G20 Indonesia yang berisikan berbagai proyek yang diinisiasi oleh berbagai pihak yang mencakup negara-negara anggota G20 dan organisasi internasional. Diusungnya *concrete deliverables* yang melibatkan banyak mitra memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia selaku tuan rumah, seperti peningkatan citra Indonesia di level internasional, kesempatan untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai mitra, dan peluang untuk membuka investasi asing.

Diimplementasikannya prinsip-bebas aktif memberikan keleluasaan bagi Indonesia dalam bersikap tanpa harus mengikatkan diri hanya pada salah satu pihak. Pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia selaku tuan rumah berhasil menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kompleksitas geopolitik Internasional seperti Amerika Serikat dan Cina. Selama presidensi G20, Indonesia juga secara aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia melalui penyelesaian konflik Rusia-Ukraina.

Konflik yang terjadi antar Rusia-Ukraina telah menjadi salah satu hambatan bagi Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dalam mencapai konsesus. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya aktif dalam meredakan konflik tersebut demi ketertiban dunia dan kepentingan nasional. Sebagai tuan rumah Presidensi G20 2022, Indonesia berupaya merangkul setiap kelompok untuk membangun dunia yang lebih baik. Presiden Joko Widodo memberikan undangan langsung Presidensi G20 Indonesia ke Rusia dan Ukraina. Hal ini menunjukkan sikap netral Indonesia untuk tidak berpihak pada kelompok tertentu. Salah satu akademisi Universitas Indonesia, Prof Andrew, menyatakan bahwa dalam hal ini Indonesia berada pada posisi yang baik dengan tidak memihak salah satu pihak. Ketidakberpihakan ini menjadi momentum untuk memulihkan kekuatan negara-negara nonblok dalam meredakan ketegangan politik global (Maudisha, 2022).

Indonesia turut aktif dalam diskusi dan upaya penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina dengan menggunakan prinsip bebas aktif. Indonesia berperan sebagai mediator netral yang berkomitmen dalam memberikan dukungan melalui diskusi konstruktif, mengurangi ketegangan, dan

mendorong perdamaian. Upaya Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan global juga termasuk penerapan prinsip bebas aktif (Danu Damarjati, 2022).

Negara-negara anggota G20 berbeda dari segi pandangan dan kebijakan dalam proses perundingan konflik Rusia-Ukraina yang dilakukan melalui implementasi prinsip bebas aktif. Indonesia berusaha dalam menciptakan diskusi yang konstruktif, menjaga keseimbangan kepentingan, dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan dengan bertindak sebagai mediator. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota G20 dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan yang menghormati kedaulatan negara dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam konflik Rusia dan Ukraina. Tujuannya yakni dapat mencapai kestabilan keamanan dan perdamaian global dan regional yang berkelanjutan (Budiawan Sidik A, 2023).

Selain menjadi mediator, sikap aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia juga terlihat dalam berbagai upaya diplomasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam membangun berdialog dengan presiden Ukraina, Zelenskyy. Di mana dalam diplomasinya, Presiden Joko Widodo membahas ekspor gandum Ukraina ke pasar global guna mencegah krisis pangan global baik kepada Putin dan Zelensky. Langkah Jokowi menemui Zelenskyy dan Putin seharusnya membuka mata dunia betapa seriusnya Presidensi G20 Indonesia dalam mengejar perdamaian dunia (Kemlu, 2018).

Sebagai Presiden G20, Indonesia memiliki wewenang untuk mengundang negara tamu. Dalam upaya meredakan ketegangan, Indonesia mengundang Ukraina ke pertemuan tersebut meski bukan anggota G20. Di satu sisi, Jokowi juga mengundang Putin, anggota G20, dan Zelensky sebagai peninjau KTT G20, yang dijadwalkan akan diadakan di Bali pada November 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai implementasi dari prinsip bebas-aktif meskipun ada tekanan dan ancaman boikot dari beberapa negara Barat untuk mengecualikan Putin.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan ada empat poin yang disampaikan Pemerintah Indonesia terkait sikapnya terhadap Ukraina. Pertama, Indonesia mengkhawatirkan eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat berbahaya bagi keselamatan rakyat dan berdampak pada perdamaian di kawasan. Kedua, Indonesia menegaskan bahwa Indonesia mematuhi hukum internasional berdasarkan Piagam PBB tentang keutuhan wilayah suatu negara, dan mengutuk setiap tindakan yang mengancam wilayah dan kedaulatan suatu negara. Ketiga, Indonesia menegaskan kembali bahwa semua pihak harus mengutamakan negosiasi dan diplomasi untuk mengakhiri konflik dan mengutamakan penyelesaian secara damai. Keempat, Indonesia melakukan upaya perdamaian dengan mengadakan pertemuan dengan Presiden Zelensky selaku Presiden Ukraina dan Presiden Vladimir Putin selaku Presiden Rusia untuk membuka ruang dialog antara keduanya sebagai upaya perdamaian dan mendorong diakhirinya konflik antara Rusia dan Ukraina (Kemlu, 2022).

Penerapan prinsip bebas aktif pada Presidensi G20 tahun 2022 menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang efektif. Prinsip ini memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif, mempertahankan kemandirian,

dan membangun kerjasama yang harmonis dengan negara-negara anggota G20 serta mencapai tujuan nasional yang lebih luas (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2022).

Selama kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20, Indonesia telah mengimplementasikan prinsip bebas-aktif sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Melalui prinsip tersebut, Indonesia berusaha untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan nasional, dan mempertahankan citra di level internasional. (PDSI KOMINFO, 2023).

## KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara yang mendapatkan kesempatan dalam Presidensi G20 tahun 2022 mengimplementasikan prinsip bebas-aktif memainkan peranan penting dalam mengedepankan kepentingan nasional Indonesia dalam berdiplomasi aktif dalam hubungan internasional dengan mengemukakan prinsip bebas-aktif sebagai landasannya. Dengan penerapan praktik hubungan internasional Indonesia yaitu prinsip bebas-aktif Indonesia mencapai keberhasilannya dalam menghadapi polarisasi dari negara-negara anggota G20 sebagai suatu tantangan global sehingga dapat menciptakan kerjasama yang harmonis pada negara-negara dengan kepentingan yang berbeda. Sebagai upaya menemukan solusi perdamaian atas konflik Rusia dan Ukraina, Indonesia juga memainkan peran dengan prinsip bebas-aktif dan menjadi mediator yang sifatnya netral. Komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dan stabilitas regional terus direalisasikan dengan diplomasi aktif dan partisipasi konstruktif dalam menyelesaikan berbagai isu global yang dihadirkan. Selain itu, melalui prinsip bebas-aktif Indonesia juga berhasil merangkul banyak pihak untuk membangun kerja sama yang dapat memberikan manfaat secara global maupun nasional. Dalam konteks ekonomi, Indonesia meningkatkan akses pasar, promosi investasi, dan perlindungan terhadap sektor ekonomi strategis melalui prinsip bebas-aktif. Hal ini membantu Indonesia memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Luki. (2023, February 26). *Polarisasi G20 Berlanjut di Presidensi India*. Kompas.id; Harian Kompas.  
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/02/26/g20-kembali-tak-satu-suara-soal-perang-di-ukraina>
- Astuti, W. R. D. (2020) 'Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19', *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), p. 131. doi: 10.25077/ajis.9.2.131-148.2020.
- Albrecht, P. et al. (2014) *Diis Report Diis Report*.
- Ariana, R. (2016) *The G20 Evolution, Interrelationships Documentation*.
- Bayu, Galih. (2019, March 20). *Saat Soekarno Bertemu John F Kennedy, Bicarakan Irian Barat hingga Komunisme Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.com; Kompas.com.  
<https://internasional.kompas.com/read/2019/03/20/17180681/saat-soekarno-bertemu-john-f-kennedy-bicarakan-irian-barat-hingga?page=all>

- Cooper, A. F. and Thakur, R. (2013) *The group of twenty (G20), The Group of Twenty (G20)*. doi: 10.4324/9780203071236.
- Damarjati, Danu (2022, March). *RI Berprinsip Bebas Aktif Sikapi Rusia Vs Ukraina, Bukan Politik Netral*. Detiknews; detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-5964449/ri-berprinsip-bebas-aktif-sikapi-rusia-vs-ukraina-bukan-politik-netral>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022). *Manfaat Presidensi G20 Bagi Indonesia*. Kemenkeu.go.id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-jakarta3/baca-artikel/14750/Manfaat-Presidensi-G20-Bagi-Indonesia.html>
- Fokus Presidensi G20 Indonesia dalam Penguatan Sistem Multilateralisme dan Kemitraan Global yang Efektif untuk Menjamin “No One Left Behind” - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). Ekon.go.id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3724/fokus-presidensi-g20-indonesia-dalam-penguatan-sistem-multilateralisme-dan-kemitraan-global-yang-efektif-untuk-menjamin-no-one-left-behind>
- Gischa, Serafica. (2020, November 3). *Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/03/153239969/politik-luar-negeri-indonesia-masa-orde-baru?page=all>
- Guebert, J., Tanna, S. and Clement, T. (2010) ‘Economic Benefits of Hosting G8 and G20 Summits’, pp. 1–6.
- Haryanto, A., Kunci, K., Kebijakan, Negeri, L., Aktif, B., & Peran, T. (2014). PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, IV*. <https://repository.unikom.ac.id/30694/1/prinsip-bebas-aktif-dalam-kebijakan-luar-negeri-indonesia.pdf>
- Haryanto, A. and Pasha, I. (2016) *Diplomasi Indonesia Realitas dan Prospek*. Indonesia, K. L. N. (no date) ‘Rencana dan Capaian Presidensi G20’. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/indonesia-usung-semangat-pulih-bersama-dalam-presidensi-g20-tahun-2022>
- <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4763/berita/bertemu-presiden-zelenskyy-presiden-jokowi-indonesia-terus-dukung-perdamaian-di-ukraina>
- <https://www.antaranews.com/berita/2996517/g20-ri-dorong-pendekatan-concrete-deliverables-agar-hidup-lebih-baik>
- Jelita, Almanda Putri, 2022 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70951/1/ALAMANDA%20PUTRI%20JELITA.FISIP.pdf>
- Jorgenson, D. W. and Vu, K. M. (2021) ‘The G20 and the world economy: Performance and prospects’, *Journal of Policy Modeling*, 43(4), pp. 770–782. doi: 10.1016/j.jpolmod.2021.02.006.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2023). *G20 Secercah Harapan di Tengah Badai Global | Sekretariat Negara*. Setneg.go.id. [https://www.setneg.go.id/baca/index/g20\\_secercah\\_harapan\\_di\\_tengah\\_badai\\_global](https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_secercah_harapan_di_tengah_badai_global)
- Kementerian Luar Negeri Indonesia (2020) ‘Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia Tahun 2020-2024’, pp. 1–209. Available at: <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50c>

y9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjAvUmVuc3RyYSUyMETlbWVubHUIMjAyMDIwLTIwMjQucGRm.

- Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Hamburg, Republik Federal Jerman. (2023). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://www.kemlu.go.id/hamburg/id/news/21875/pimpin-sesi-iii-ktt-g20-presiden-jokowi-serukan-penghentian-perang>
- Maudisha (2023). <https://www.ui.ac.id/presidensi-g20-indonesia-2022-momentum-ciptakan-perdamaian-dunia/>
- National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy on JSTOR. (2023). Jstor.org. <https://www.jstor.org/stable/3013584>
- Newswire, & Hadijah Alaydrus. (2022, February 24). *Pemerintah Indonesia Tegaskan 4 Sikap Terkait Invasi Rusia ke Ukraina*. Bisnis.com; bisnis.com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220225/15/1504654/pemerintah-indonesia-tegaskan-4-sikap-terkait-invasi-rusia-ke-ukraina>
- PDSI KOMINFO. (2023). *KTT G20 Diyakini Buka Peluang Investasi Baru Masuk ke Indonesia*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/45584/ktt-g20-diyakini-buka-peluang-investasi-baru-masuk-ke-indonesia/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/45584/ktt-g20-diyakini-buka-peluang-investasi-baru-masuk-ke-indonesia/0/artikel_gpr)
- PDSI KOMINFO. (2023). *Indonesia Perlu Tonjolkan Nilai-nilai Pancasila di KTT G20*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/45450/indonesia-perlu-tonjolkan-nilai-nilai-pancasila-di-ktt-g20/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/45450/indonesia-perlu-tonjolkan-nilai-nilai-pancasila-di-ktt-g20/0/artikel_gpr)
- PPID Kementrian Luar Negeri RI (2020) 'Pemberitahuan tertulis', p. 2020.
- Parlar Dal, E. (2022) 'G20 Rising Powers in the Changing International Development Landscape: An Introduction', *G20 Rising Powers in the Changing International Development Landscape*, pp. 1-16. doi: 10.1007/978-3-031-07857-6\_1.
- Prof. dr. sugiyono (2018), *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Intro
- Sidik, Budiawan A. (2023, June 24). *Terus Mengupayakan Perdamaian bagi Rusia dan Ukraina*. Kompas.id; Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/06/24/terus-mengupayakan-perdamaian-bagi-rusia-dan-ukrai>
- Sabir, M. (2022). Politik bebas aktif | Perpustakaan Soepardjo Roestam BSKDN Kemendagri. *Perpustakaan Soepardjo Roestam BSKDN Kemendagri*. <https://doi.org/9794120766>
- Thompson, K. W. (1971). *National Interest - Joseph Frankel: National Interest*. (New York: Praeger Publishers, 1970. Pp. 173. \$5.00.). 33(3), 435-437. <https://doi.org/10.1017/s0034670500013450>
- Yosefi, (2023) *A New Experiment in Global Governance* (March), pp. 1-14.